

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan unit operasional di bawah tanggung jawab pemerintah pusat, daerah dan kabupaten yang entitasnya permanen dan didirikan secara legal dengan tata batas hutan yang jelas. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari KPH memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan ekonomi, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta konservasi keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan atau pemegang izin, dimana pengelola hutan atau pemegang izin wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui pola kemitraan. Dengan pola kemitraan ini masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan tujuan agar pengelolaan hutan lestari ke dalam sinergi kelestarian sosial, lingkungan dan kelestarian ekonomi (Elvida dan Sylviani, 2010).

Menurut Ekawati et al, (2020) pendekatan partisipatif dalam pembangunan masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan skema kemitraan menimbulkan dampak positif, antara lain: meningkatnya kesadaran masyarakat, terbangunnya komunikasi (dalam menyampaikan aspirasi) yang lebih baik antara masyarakat dengan Dinas Kehutanan, dan dapat diimplementasikannya pengetahuan yang diperoleh dari petani lainnya. Ruhimat (2010) menyatakan bahwa optimasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan bagi kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan memegang prinsip, bahwasannya setiap kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 3 PP No. 6 Tahun 2007 KPH dibagi menjadi tiga bagian fungsi, yaitu KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL), dan KPH Produksi (KPHP). Adapun peran dari KPH yaitu:

- Optimalisasi akses masyarakat terhadap hutan serta merupakan salah satu jalan bagi resolusi konflik
- Optimalisasi potensi melalui pemanfaatan hutan sesuai dengan yang ada di

lapangan

- Menjadi salah satu wujud nyata bentuk desentralisasi sektor kehutanan, karena organisasi KPHP dan KPHL adalah organisasi perangkat daerah
- Menjembati optimalisasi pemanfaatan potensi pendanaan dari hibah luar negeri di sektor kehutanan untuk kepentingan pembangunan masyarakat

KPHP Kerinci Unit I terletak di Kabupaten Kerinci dan merupakan salah satu wilayah unit kelola KPH Provinsi Jambi. KPHP Kerinci Unit I ditetapkan dalam SK Menhut RI No. SK.960/Menhut-II/2013 pada tanggal 27 Desember 2013 dengan luas wilayah mencapai  $\pm 34.250 \text{ Km}^2$ . Kawasan hutan KPHP Kerinci Unit I merupakan kawasan budidaya yang berfungsi sebagai kawasan hutan produksi dengan pola partisipasi masyarakat. Dari segi luasan, KPHP Kerinci Unit I memiliki potensi sumberdaya hutan yang sangat besar dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi khususnya potensi HHBK.

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) merupakan salah satu sumber daya hutan yang berperan sebagai penggerak ekonomi dan pemasukkan pendapatan langsung bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta memberikan sumbangan terhadap pemasukan negara yang sama besar dan bahkan mungkin lebih dari pendapatan kayu bulat. Salah satu produk HHBK yang memiliki nilai jual yang cukup menjanjikan dan banyak diminati oleh kalangan masyarakat Indonesia maupun luar yaitu usaha madu. Usaha madu merupakan salah satu sumber daya potensial untuk dikembangkan hal ini dikarenakan sumber pakan lebah di sekitar wilayah kerja KPHP Kerinci cukup banyak baik yang berasal dari tanaman hutan, tanaman pertanian maupun tanaman perkebunan. Usaha madu juga dapat dijadikan alternatif usaha dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dengan menerapkan prinsip kelestarian dan tetap memperhatikan fungsi hutan.

Pada tahun 2017 UPTD KPHP Kerinci Unit I membentuk koperasi unit usaha yang diberi nama “Koperasi Rimbun” dan tertuang dalam Sk Plt Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Kerinci Unit 1 No. 03/Kep/KPHP-Kerinci/2017 tentang Penetapan Pengelolaan Koperasi Rimbun Koperasi Unit Usaha yang

selanjutnya koperasi tersebut berjalan dalam bidang usaha produk mentah dan olahan HHBK. Adapun tujuan dari koperasi ini adalah:

1. Mendapatkan keuntungan dari produk HHBK.
2. Membudayakan produk HHBK sebagai produk berkualitas dan bermanfaat untuk kesehatan.
3. Membuat produk makanan yang mempunyai inovasi baru dan disukai seluruh kalangan masyarakat.
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan

Selama menjalankan unit bisnisnya masyarakat usaha madu mengalami beberapa kendala dalam budidaya madu. Adapun beberapa kendala yang dialami masyarakat usaha madu yaitu produksi madu tidak memakai periode waktu tertentu, tidak memiliki target penjualan pada periode tertentu, adanya gangguan hama dan kurangnya sarana produksi. Oleh sebab itu, UPTD KPHP Kerinci memberikan bantuan kepada masyarakat usaha madu dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam budidaya madu dan meningkatkan produksi usaha madu. Berikut jenis bantuan yang diberikan UPTD KPHP Kerinci kepada masyarakat usaha madu, bantuan informasi harga, bantuan teknologi, bantuan pelatihan atau penyuluhan dan bantuan pemasaran. Dengan harapan bantuan-bantuan tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap pendapatan masyarakat usaha madu. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *“Analisis Pengaruh KPHP Terhadap Pendapatan Masyarakat Usaha Madu di Wilayah Kerja KPHP Unit I Kerinci Kabupaten Kerinci”*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana pengaruh KPHP terhadap pendapatan masyarakat usaha madu di KPHP Kerinci Unit I ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh KPHP terhadap pendapatan masyarakat usaha madu di wilayah kerja KPHP Kerinci.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi bagi *Stakeholders* agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar KPHP Kerinci Unit I.
2. Sebagai acuan dalam mengembangkan usaha madu di suatu daerah terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
3. Sebagai bahan referensi bagi para pihak yang berkepentingan

#### **1.5 Hipotesis Penelitian**

1. Ada pengaruh Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) terhadap pendapatan masyarakat usaha madu di wilayah kerja KPHP Kerinci Unit I Kabupaten Kerinci
2. Tidak ada pengaruh Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) terhadap pendapatan masyarakat usaha madu di wilayah kerja KPHP Kerinci Unit I Kabupaten Kerinci.